



REPUBLIK INDONESIA

**PIDATO
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PENGANTAR DAN KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN ANGGARAN 2018**

**RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA, MEI 2017

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,***

***Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,***

***Yang Saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua,
dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,***

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, pagi ini kita bisa menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami atas nama Pemerintah, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2018.

Hadirin yang saya muliakan,

Pemerintah secara bertahap telah menjalankan program pembangunan nasional seperti digariskan dalam Nawacita. Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, kinerja ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih terjaga dan tumbuh dalam tingkat yang cukup baik. Tingkat kemiskinan dan pengangguran telah berhasil diturunkan. Namun demikian, beberapa tantangan sosial ekonomi masih perlu kita perhatikan.

Tantangan yang paling utama tentu saja adalah pengentasan lebih dari 27 juta saudara kita yang saat ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka berhak memiliki kehidupan yang layak, dan Pemerintah harus hadir memberikan solusi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan baik antar kelompok pendapatan maupun kesenjangan antarwilayah, serta berbagai permasalahan sosial lain yang harus kita hadapi, termasuk di antaranya isu kesetaraan gender dan isu kelestarian lingkungan.

Dengan modal sosial, ekonomi dan sumber daya manusianya, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara maju, adil, dan sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar, kelas menengah yang meningkat jumlahnya, dan didukung sistem politik yang demokratis. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan

pembangunan sistem yang adil merupakan prioritas utama. Ekonomi kita harus tumbuh lebih tinggi, semakin inklusif, merata, dan berkeadilan. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk mewujudkan tekad mulia ini.

Hari ini perkenankanlah saya mengajak semua komponen bangsa untuk bersatu dan bersama-sama membangun bangsa, membangun masa depan kita semua. Dalam satu generasi, sekitar 28 tahun lagi, Republik Indonesia akan berusia satu abad (yaitu pada tahun 2045). Alangkah membanggakannya jika sebelum itu Indonesia sudah naik kelas menjadi negara maju, dengan pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang jauh lebih tinggi, serta banyak lagi pencapaian lainnya.

Untuk mencapai cita-cita mulia itu, kita harus bekerja keras, bahu membahu, membangun dan mencari persamaan, bukan mempertajam perbedaan di antara kita. Hanya sedikit negara di dunia ini yang mampu naik kelas menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Indonesia harus bisa masuk dalam kelompok ini, dengan belajar dari mereka yang telah sukses dan menghindari kesalahan yang sudah pernah gagal.

Kita harus bertekad bahwa generasi penerus kita akan dapat merayakan 100 tahun Proklamasi RI dengan penuh kebanggaan dan suka cita. Mereka bangga dan merasa terhormat, sebab Republik Indonesia yang mereka warisi adalah sebuah negeri yang ramah, negeri yang maju dalam cara berpikir toleran dalam menyikapi keragaman, negeri terbuka, demokratis, bermartabat sehingga disegani dan dikagumi oleh berbagai negeri lainnya.

Kita bersyukur diberikan kesempatan saat ini untuk dapat menjadi bagian dari Republik Indonesia yang dapat menyumbangkan pikiran dan tenaga dalam ikhtiar untuk membawa Indonesia makin mendekati pada tujuan kemerdekaan dan cita-cita mulia bagi seluruh bangsa Indonesia.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Perekonomian dunia masih akan penuh ketidakpastian dan penuh persaingan, sehingga tugas kita adalah membangun perekonomian Indonesia yang berdaya tahan dengan motor pertumbuhan yang kokoh dan kuat yang memiliki daya saing tinggi serta mampu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan

kesenjangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang sangat penting harus terus dirancang dan diarahkan untuk membangun fondasi ini. APBN harus kredibel dan fleksibel agar efektif dalam mengelola dan menjaga perekonomian. APBN harus dijaga dari penyakit inefisiensi, pemborosan dan korupsi yang mengkhianati dasar bernegara yang baik dan akuntabel.

Hadirin yang saya muliakan,

Berikutnya, izinkan kami menyampaikan gambaran perekonomian makro Indonesia yang akan menjadi landasan dalam menyusun asumsi dasar dalam perhitungan anggaran tahun 2018.

Walaupun dihadapkan berbagai kendala dan ketidakpastian, Pemerintah tetap berupaya keras mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata. Untuk itu, di tahun 2018 Pemerintah telah menetapkan sasaran pertumbuhan pada kisaran 5,4-6,1 persen. Sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan dan juga daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Ketimpangan horizontal saat ini masih terjadi, di mana perekonomian masih sangat terpusat di Pulau Jawa yang mencakup hampir 60 persen dari total PDB. Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan juga masih rentan terhadap siklus harga komoditas. Kesenjangan antara kota dan desa juga harus terus diatasi.

Sementara itu dari sisi sektoral, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja perlu didorong, sehingga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Dengan makin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh, untuk itu penguatan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah yang efisien dan berbasis pada sektor pertanian dan pertambangan perlu didorong dan dikembangkan. Pemerintah juga terus mendorong industri manufaktur, konstruksi serta industri jasa termasuk perkembangan industri berbasis digital yang sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan regulasi yang kondusif.

Perbaikan pasar tenaga kerja yang mencakup peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia dan penguatan regulasi merupakan prioritas yang sangat penting, agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, maka pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga perlu terus dijaga. Untuk itu, Pemerintah akan berupaya keras menjaga laju inflasi dalam negeri pada tingkat yang rendah untuk menjamin daya beli masyarakat. Di tahun 2018, Pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang $3,5 \pm 1,0$ persen. Tingkat inflasi yang rendah tidak saja mendorong perekonomian domestik untuk menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tetapi juga akan menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan pada akhirnya akan memperbaiki tingkat kesejahtraannya.

Pada sisi lain, dalam rangka pengendalian inflasi, Pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan antara sisi penawaran dan sisi permintaan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan barang khususnya pangan, kapasitas produksi nasional harus terus ditingkatkan. Selain itu, Pemerintah tetap mengalokasikan subsidi pangan dan dana cadangan pangan yang digunakan untuk penyediaan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Peran aktif Pemerintah Daerah juga diperlukan untuk menjaga laju inflasi di masing-masing wilayah. Pemerintah akan selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk mendukung pengendalian inflasi.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar perlu dijaga pada tingkat yang aman dalam rangka menjaga kepercayaan dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa di tahun 2018 masih banyak faktor yang akan menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar mata uang seluruh negara, baik dari faktor dinamika ekonomi negara maju, termasuk normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, perkembangan ekonomi di RRT, faktor geo-politik serta keamanan regional dan dunia. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2018 diperkirakan berada dalam rentang Rp13.500-Rp13.800 per dolar Amerika Serikat. Dalam kesempatan ini, perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa depresiasi Rupiah tidak selalu berarti negatif terhadap perekonomian domestik. Depresiasi nilai tukar pada batas-batas tertentu akan berdampak positif bagi perbaikan daya saing produk ekspor Indonesia, yang pada gilirannya mendorong

pertumbuhan ekonomi. Permasalahan utamanya adalah bagaimana mengelola pergerakan nilai tukar tersebut agar tidak terjadi gejolak atau volatilitas yang mengganggu iklim usaha dan aktivitas ekonomi.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Perekonomian Indonesia di tahun 2018 masih akan dipengaruhi perkembangan sektor keuangan global. Berbagai ketidakpastian pemulihan ekonomi di Eropa, penyesuaian pembangunan di RRT dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat akan mempengaruhi kondisi instrumen-instrumen keuangan di pasar domestik, termasuk di antaranya adalah pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Namun demikian, dengan didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian nasional, terjaganya laju inflasi dan nilai tukar, maka tekanan-tekanan yang berasal dari ketidakpastian perekonomian global diharapkan dapat diminimalisir. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, rata-rata Suku Bunga SPN 3 bulan tahun 2018 diperkirakan sebesar 4,8-5,6 persen.

Asumsi harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesia Crude Oil Price* (ICP) pada tahun 2018, diperkirakan berada pada kisaran US\$45-60 per barel. Pergerakan ICP biasanya seiring dengan pergerakan harga minyak mentah dunia yang dinamikanya makin sulit untuk diprediksi. Faktor pemulihan ekonomi dunia, keamanan, politik, bencana alam, dan inovasi teknologi akan menentukan dinamika harga minyak. Pada tahun 2018, harga minyak mentah dunia diperkirakan akan mengalami peningkatan karena naiknya permintaan sebagai akibat mulai pulihnya perekonomian global. Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa lembaga internasional memperkirakan produksi minyak mentah dunia relatif stabil.

Asumsi *lifting* minyak dan gas bumi pada tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.965-2.050 ribu barel per hari, yang terdiri dari *lifting* minyak bumi sekitar 771-815 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.194-1.235 ribu barel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat *lifting* tersebut berdasarkan pertimbangan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan mulai beroperasi, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas pada tahun 2018.

Seluruh gambaran ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan KEM-PPKF tahun 2018 yang digunakan dalam Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2018.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Perumusan PPKF 2018 tidak terlepas dari arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah. Secara umum, kerangka kebijakan fiskal jangka menengah 2017-2021 diarahkan untuk memperkuat kredibilitas dan efektivitas pengelolaan fiskal, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang makin merata dan berdaya tahan.

Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan kontribusi penerimaan perpajakan akan semakin optimal, belanja untuk mendorong pertumbuhan sekaligus mewujudkan kesejahteraan semakin tepat sasaran, efisien dan efektif, serta pengelolaan fiskal ke depan semakin fleksibel, responsif dan berkelanjutan.

Dalam jangka menengah diharapkan *tax ratio* akan meningkat, struktur belanja negara semakin produktif, defisit dan rasio utang terkendali serta keseimbangan primer menuju positif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penguatan tiga fungsi utama kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Penguatan fungsi alokasi dilakukan dengan perbaikan alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas, mendukung program prioritas untuk meningkatkan dan memperkuat modal dasar Indonesia yaitu kualitas manusia yang makin baik serta pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan. Fokus alokasi anggaran adalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya, penguatan fungsi distribusi untuk mengurangi kesenjangan dan memperbaiki keadilan sosial ditempuh dengan meningkatkan peran pajak sebagai instrumen untuk redistribusi pendapatan, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, serta mendorong efektivitas program perlindungan sosial. Melalui penguatan fungsi ini diharapkan program pengentasan kemiskinan dan kesenjangan akan berjalan efektif.

Sementara itu, penguatan fungsi stabilisasi ditempuh dengan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal untuk melaksanakan *counter cyclical* dalam rangka

menjaga momentum pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga stabilitas kondisi sosial dan politik dari tekanan gejolak ekonomi dari luar maupun dari dalam negeri.

Dengan arah dan strategi tersebut, maka pertumbuhan ekonomi dan derajat kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan. Seperti yang telah disampaikan di depan, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 ditargetkan mencapai 5,4-6,1 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran diharapkan turun menjadi 5,1-5,4 persen, dan tingkat kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 9,0-10,0 persen. Ketimpangan juga diharapkan semakin mengecil, yang ditandai dengan penurunan Rasio Gini menjadi 0,38. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat, tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 71,38.

Namun demikian, dalam pengelolaan fiskal, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. *Pertama*, perlunya memperkuat ruang fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi dengan menopang belanja produktif dan prioritas. *Kedua*, perlunya memperkuat kualitas belanja untuk menstimulasi perekonomian sekaligus mewujudkan kesejahteraan. *Ketiga*, perlunya meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan subsidi serta transfer ke daerah untuk mengakselerasi pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan. Keempat, perlunya tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat fondasi kebijakan ekonomi.

Dengan memperhatikan dinamika perekonomian, berbagai tantangan yang dihadapi dan target pembangunan yang harus dicapai, maka tema kebijakan fiskal 2018 adalah “memantapkan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan”.

Untuk itu, pada tahun 2018 Pemerintah akan menempuh tiga strategi utama melalui optimalisasi pendapatan negara dengan menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas, serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Dalam tahun 2018, pada sisi pendapatan negara, Pemerintah akan tetap secara konsisten berupaya untuk mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui berbagai terobosan kebijakan.

Secara umum kebijakan penerimaan perpajakan diarahkan untuk meningkatkan rasio perpajakan dan kepatuhan namun dengan tetap menjaga iklim investasi.

Pada tahun 2018, diharapkan *tax ratio* dapat mencapai 11-12 persen meningkat dibandingkan dengan *tax ratio* tahun 2016 sebesar 10,36 persen. Upaya pencapaian akan menghadapi tantangan yang cukup berat, namun melalui kerja keras, reformasi perpajakan yang konsisten, penguatan kelembagaan perpajakan, penggalan potensi dan penegakan hukum yang objektif, target tersebut diharapkan dapat dicapai.

Pemerintah mendorong optimalisasi PNBPN dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pelayanan publik. Upaya ini ditempuh dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, serta mendorong peningkatan kinerja BUMN.

Pada sisi belanja negara, Pemerintah juga terus melakukan peningkatan kualitas belanja. Alokasi belanja barang didorong lebih efisien dan kualitas belanja modal ditingkatkan agar lebih produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta perbaikan kualitas manusia dan kelembagaan.

Selanjutnya, Pemerintah mendorong efektivitas program-program perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran dan penguatan desentralisasi fiskal untuk mengakselerasi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Pemerintah juga terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, perbaikan akses dan mutu layanan kesehatan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu untuk mendorong pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi, Pemerintah mengembangkan sektor unggulan seperti dukungan untuk mewujudkan ketahanan energi, ketahanan pangan, kemaritiman, pariwisata, dan industri. Untuk mendukung hal tersebut, pembangunan irigasi, ketenagalistrikan, infrastruktur konektivitas, kawasan industri, dan efisiensi sistem logistik akan menjadi agenda prioritas.

Pada sisi lain, Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan efisiensi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Di samping itu, secara konsisten juga berupaya mengantisipasi ketidakpastian, melakukan penanganan bencana, dan mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pada sisi pembiayaan, Pemerintah juga akan terus mendorong agar pembiayaan anggaran lebih efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Rasio utang terhadap PDB akan terus dijaga dalam batas yang terkendali, berkisar 27-29 persen. Pemerintah juga akan terus memperkuat postur anggaran dengan meminimalkan defisit primer. Pemanfaatan utang diarahkan untuk kegiatan yang benar-benar produktif sehingga menghindarkan warisan masalah bagi generasi yang akan datang. Pemerintah akan terus mengembangkan pembiayaan yang kreatif dengan memberdayakan peran swasta dan BUMN untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

Sementara itu Pemerintah juga konsisten mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau dan mendorong penguatan pembentukan *sovereign wealth fund (SWF)* pendidikan dalam rangka memenuhi keadilan antar generasi. Pemerintah secara bertahap akan mulai membenahi sistem penggajian dan pensiun bagi aparatur sipil negara untuk memperbaiki kinerja, disiplin dan kualitas ASN serta perbaikan kesejahteraan dan kepastian hari tua, dan sekaligus memperkuat sumber pendanaan jangka panjang.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018. Besar harapan kami atas segala dukungan, masukan, dan kerjasama seluruh anggota Dewan yang terhormat dalam pembahasan KEM-PPKF tersebut, sebagai pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2018.

Sebagai penutup, perkenankanlah kami mengingatkan bahwa kebijakan serta pengelolaan ekonomi tidak berada di ruang vakum. Kondisi sosial politik yang mencerminkan dinamika *check and balance* secara damai dan harmonis yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan optimal, akan menghantarkan Indonesia maju makin mendekati cita-cita pendirian negeri ini. Dan sebaliknya, jika demokrasi Indonesia terlalu terbebani oleh berbagai permasalahan yang kontra-produktif dan bahkan mengancam kesatuan dan fondasi negara kita, imbasnya akan langsung terasa pada berbagai hal, termasuk pada situasi perekonomian, yang akibatnya tentu saja negatif pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, besar harapan kami bahwa DPR RI sebagai lembaga politik terdepan bekerja bersama Pemerintah dan lembaga yudikatif untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta memperkuat stabilitas sosial politik kita menjadi lebih baik dan lebih harmonis. Ungkapan lama masih terus relevan hingga saat ini yang harus menjadi pegangan dalam kita berpolitik dan mengabdikan kepada negara : “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.”

Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia dalam upaya kita menjalankan roda pembangunan menuju bangsa dan negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Wassalammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.